

BAB VI KESIMPULAN

Penelitian ini sesungguhnya masih terlalu simpel dan belum bisa dikatakan memadai untuk sebuah kajian pemikiran politik Islam yang sangat luas dan kompleks baik dari segi varian dan karakteristiknya. Apalagi kalau penelitian ini juga menyertakan pendekatan historis dan sosiologis yang secara praktis membutuhkan banyak energi untuk merumuskannya agar dicapai suatu akurasi dan konsistensi penelitian yang akseptabel. Meski demikian, penelitian ini akan tetap berguna, setidaknya untuk peneliti-peneliti lain yang ingin mendapatkan beberapa informasi awal seputar sejarah dan pertumbuhan pemikiran politik Islam itu.

Kesimpulan ini akan sesuai dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu tentang pemikiran politik Amien Rais, khususnya dalam konteks pemahaman dasar tentang Islam dan relevansinya dengan diskursus demokrasi kontemporer.

Amien Rais adalah intelektual Indonesia kontemporer yang muncul dengan menegaskan sikap-sikap atau identitas dasar tipikal kaum sunni. pemikirannya yang kritis terhadap kekuasaan lahir, karena Amien menganggap negara ini sudah cukup stabil, sehingga yang harus dirumuskan kemudian adalah bagaimana menjadikan Indonesia lebih demokratis, meskipun Amien secara umum juga tidak setuju dengan perubahan politik yang bersifat radikal dan bersifat revolusioner sebagaimana menjadi ciri khas intelektual sunni periode klasik dan abad pertengahan.

Amien Rais tampil untuk merumuskan gagasannya dengan mengambil beberapa segi positif dari pemikiran politik sunni sebelumnya. Sedangkan pemikiran politik yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan jaman modern tidak digunakan. Amien membuat suatu sintesis atau merumuskan pemikiran baru yang lebih kritis dan moderat dengan tetap menggunakan prinsip masalah atau kepentingan umum sebagai salah satu acuan pemikirannya.

Amien Rais, karena sikap dan pemikiran politiknya merupakan sintesis positif antara pemikiran sunni sebelumnya dan gagasan individualnya yang kritis

dan berorientasi pada kemaslahatan umum, dengan mudah dan sadar bisa menerima gagasan demokrasi modern secara terbuka. Bagi Amien persoalannya bukan sekadar demokrasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, tetapi lebih dari itu, pembentukan masyarakat atau negara yang adil dan egaliter seperti yang dikehendaki Islam, untuk zaman sekarang hanya mungkin diwujudkan melalui sistem negara demokrasi.

Dalam peta pemikiran politik Islam kontemporer, khususnya dalam kajian mengenai hubungan antara agama dan negara, ditemukan tiga pola pemikiran: sekuler, tradisional, dan reformis. Pola sekuler menyatakan bahwa Islam hanyalah agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Di dalamnya tidak ditemukan aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. Sebaliknya, pola tradisional menegaskan bahwa Islam adalah agama yang paripurna. Di dalamnya ditemukan semua aturan, termasuk aturan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan. Karena itu, umat Islam tidak perlu meniru aturan Barat, tetapi harus kembali kepada aturan yang digariskan Islam. Adapun pola reformis menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang ajarannya semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan bukan juga agama yang paripurna dalam arti ajarannya telah mencakup semua aturan secara rinci, termasuk aturan tentang hidup kenegaraan. Menurut kaum reformis, Islam cukup memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat dipedomani manusia dalam mengatur perilaku dan hubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai manuver dan aktivitas politik Amien Rais dalam dasawarsa 1990-an ini sesungguhnya merupakan aktualisasi dan representasi dari sikap kesunnian dan komitmen yang tinggi terhadap demokrasi. Suara kritis Amien Rais terhadap skandal emas di Busang, Freeport, dan berbagai praktek kolusi dan korupsi diberbagai lembaga pemerintahan merupakan wujud komitmennya yang serius untuk mewujudkan kemaslahatan umum pada level praktis yang sesungguhnya. Demikian juga aktivitasnya dalam politik praktis seperti dalam posisinya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikan bersama-sama dari berbagai agama dan etnis;

merupakan manifestasi dari komitmen Amien Rais terhadap demokrasi yang lebih substantif, tidak sekadar formalitas-prosedural seperti yang ada pada Orde Baru.

Dalam hal ini, paradigma yang digunakan Amien Rais untuk menemukan hubungan Islam dan demokrasi adalah mendasarkan paradigma pemikiran pada konsep tauhid, dimana konsep ini bukan saja mengandung spirit persamaan dan pembebasan, tetapi juga mengharuskan adanya sistem politik yang demokratis. Karena sistem, tirani atau totalitarian bertentangan secara fundamental dengan semangat tauhid.

Kerangka pemikiran yang dibangun Amien Rais berpusat pada konsep tauhid yang menghendaki suatu konstruksi masyarakat atau negara yang bebas penindasan, eksploitasi dan kekuasaan yang tidak adil atau sewenang-wenang. Penindasan, eksploitasi, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan merupakan sesuatu yang bertolak belakang secara diametrikal dengan semangat tauhid. Untuk mewujudkan yang bebas dari sistem ini, tiga fundamentals Islam bagi pengaturan masyarakat dan negara seperti disebutkan sebelumnya harus ditegakkan. Penegakan fundamentals itu sendiri baru bisa berjalan efektif jika mekanisme politik check and balance atau dalam bahasa al-Quran sering disebut sebagai amar ma'ruf nahy munkar

Amar ma'ruf nahy munkar sebagai salah satu implementasi konsep tauhid dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan praktis merupakan suatu formula mengenai etika keagamaan yang ditempatkan sebagai basis politik kelembagaan dan sistem perilaku publik yang bersifat dialektis. Dalam rangka amar ma'ruf nahy munkar, masyarakat atau negara demokrasi merupakan suatu proses dialektis yang senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Karena itu, amar ma'ruf nahy munkar merupakan suatu prinsip etis yang sangat kondusif bagi tegaknya sistem demokrasi dimanapun dan dalam ekspresi bahasa politik apapun

Tiga alasan mengapa Amien Rais menjadikan demokrasi sebagai preferensi terbaik bagi Islam atau pun pengembangan masyarakat negara. Pertama, demokrasi tidak saja merupakan bentuk vital dan terbaik pemerintahan yang mungkin diciptakan, tetapi juga merupakan suatu doktrin politik luhur yang

memberikan manfaat bagi kebanyakan negara. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan mempunyai akar sejarah yang panjang sampai zaman ke zaman Yunani kuno, sehingga ia tahan bantingan dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil. Ketiga. Demokrasi merupakan sistem yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat dinegara manapun memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya.

Kreteria-kreteria demokrasi yang dikemukakan Amien Rais ada sembilan macam, namun disini tidak akan dikemukakan seluruhnya karena seluruh kriteria dimaksud ada yang sama secara substansial. *Pertama*, partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Secara ideal, partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan politik merupakan bentuk partisipasi yang memungkinkan hasil yang terbaik bagi kepetingan rakyat secara keseluruhan. Namun karena hal itu tidak mungkin dilakukan, misalnya karena luasnya wilayah geopolitik dan banyaknya warga negara kuantitatif, maka partisipasi dilakukan secara tidak langsung dan pengambilan keputusan yang dipilih dan diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Karena itu, menurut Amien Rais, salah satu yang perlu ditekankan di sini adalah pemilihan wakil-wakil rakyat itu harus dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kedua, persamaan didepan hukum. Menurut Amien Rais, negara demokrasi selalu merupakan negara hukum Rule of law harus ditaati oleh seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama, ras, status sosial. Persoalan yang sangat signifiktan dalam negara demokrasi bukan saja soal perlakuan sama di depan hukum, tetapi juga proses pengambilan keputusan hukum dan perundang-undangan dilapangan. Kedua aspek ini harus dilaksanakan secara konsisten dan adil dengan di dukung oleh institusi kontrol yang indenpenden.

Ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Konsep ekuualitas atau persamaan dalam demokrasi sebenarnya merupakan konsep yang utuh. Artinya, persamaan

tidak bisa ditekankan pada salah satu aspek saja. Ekualitas hukum dan politik hanya akan lengkap jika dibarengi dengan ekualitas di bidang sosial ekonomi. Untuk keperluan ini, persamaan di sektor ekonomi tidak cukup sebatas *de jure*, tetapi juga *de facto*, agar persamaan yang dirumuskan justru tidak menjadi justifikasi atau titik masuk bagi eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Keempat, kesempatan pendidikan yang sama. Demokrasi bukan hanya merupakan sistem yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat, tetapi juga sangat potensial untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, karena prinsip persamaan juga berlaku di bidang pendidikan. Menurut Amien Rais, dalam masyarakat yang mulai memasuki tahap industrialisasi, pendidikan menjadi faktor krusial yang menentukan apakah seseorang sangat ditentukan oleh tingkat sosial ekonominya, maka menjadi jelas bahwa dalam masyarakat yang masih senjang distribusi pendapatannya pasti senjang pula kesempatan pendidikannya. Tingkat pendidikan masyarakat ini akan sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan dan daya kritis mereka yang pada gilirannya nanti akan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Kelima, kebebasan yang dijamin undang-undang. Amien Rais menyebut empat macam kebebasan berbicara atau mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul atau berorganisasi, dan kebebasan beragama. Selain empat macam kebebasan ini masih ada kebebasan lain yaitu kebebasan atau hak untuk mengajukan petisi (*freedom of petition*) dan hak untuk proses atau beroposisi. Signifikansi hak protes adalah untuk mencegah atau melakukan kontrol agar kekuasaan yang ada tidak mengarah kepada bentuk yang korup dan despotik, karena pada umumnya kekuatan cenderung demikian.

Keenam, ketersediaan dan keterbukaan informasi. Rakyat perlu mengetahui tidak saja kualitas para pemimpinnya melainkan juga situasi yang selalu berkembang yang mempengaruhi kehidupan mereka dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Untuk itu, rakyat perlu informasi yang cukup dan terbuka sehingga terbuka bagi mereka berbagai alternatif dan cakrawala masalah yang dihadapi. Utamanya, rakyat harus *well-informed* mengenai politik pemerintah sehingga tidak ada sikap *apriori* menerima atau menolak kebijakan,

apology bila kebijakan itu menyangkut suatu masalah yang prinsipil dan fundamental.

Ketujuh, mengindahkan fatsoen atau etika politik. Demokrasi memiliki etika politik yang harus selalu diindahkan. Etika politik memang tidak pernah tertulis, tetapi sangat jelas bagi setiap orang yang paham tentang nilai-nilai demokrasi. Tanpa suatu etika politik, maka atau kekuasaan yang ada akan cenderung menghalalkan segala cara. Dalam bahasa agama (Islam), etika politik yang dibutuhkan adalah al-akhlaq al-karimah.

Kedelapan, kebebasan individu. Hak untuk hidup secara bebas dan memiliki privacy (kehidupan privat atau hak-hak pribadi), seperti yang diinginkan adalah suatu prinsip demokrasi. Hak untuk memilih pekerjaan, tempat tinggal, bentuk pendidikan, harus dijamin dalam sistem demokrasi kecuali kalau kebebasan itu sudah merugikan pihak lain.

Kesembilan, semangat kerja sama. Kerja sama di antara warga negara untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang telah disepakati bersama merupakan prinsip yang harus dikembangkan dalam sistem demokrasi. Demokrasi disatu sisi menghargai sikap hidup individualistik sebagaimana tercermin dalam pola hidup liberal, namun di sisi lain, demokrasi juga mengembangkan sistem collectivities atau kerja sama, misalnya dalam mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak

Berdasarkan pola di atas, pemikiran politik Amien dapat dikatagorekan sebagai pemikiran reformis. Ia berpendapat bahwa di dalam al-Qur'an dan sunna tidak ditemukan aturan-aturan yang langsung dan rinci mengenai masalah-masalah kenegaraan. Yang ada hanyalah seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Kelihatannya, Amien masih menganut pendapat bahwa agama dan negara (*din wa dawlah*) tidak dapat dipisahkan.

Nilai-nilai etika yang dimaksud Amien adalah perlunya prinsip tauhid diterapkan dalam pengelolaan hidup bermasyarakat adalah untuk mewujudkan masyarakat bermoral dan memiliki integritas ruhani yang sempurna. Selain itu, prinsip tauhid pada gilirannya akan melahirkan pola hubungan antarmanusia

dalam semangat egalitarianisme. Tauhid pada hakekatnya mendukung sistem demokrasi, dan sebaliknya, menolak sistem totaliter, otoriter, dan tiranik. Implementasi tauhid dalam kehidupan bermasyarakat akan membuat setiap individu menyadari jati diri mereka masing-masing sebagai hamba Allah, dan memahami harkat dan martabat kemanusiaannya sehingga dengan demikian mereka dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Sementara itu, prinsip sunatullah mendorong manusia bersikap fatalistis. Selain itu, prinsip ini membawa kepada pengakuan adanya pluralisme dalam masyarakat.

Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan hidup bermasyarakat dalam Islam tidak didasarkan pada ikatan-ikatan primordial, seperti keturunan, kesukuan, dan kehormatan golongan. Itulah sebabnya dalam masyarakat Islam tidak dikenal bentuk mayoritas, tidak ada kelas, tidak ada kelompok elit atau borjuis, juga tidak ada kelompok aristokrasi. Berdasarkan prinsip tersebut diharapkan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat didasari oleh semangat persaudaraan, cinta kasih, dan rasa keadilan. Amien menegaskan bahwa prinsip inilah hendaknya yang menjadi pegangan umat Islam dalam mengatur dan membina masyarakat sesuai dengan tuntunan zaman yang senantiasa berubah seiring dengan perkembangan sains dan teknologi.

Paradigma pemikiran Amien Rais dalam konteks tertentu mempunyai implikasi berbeda, khususnya dalam merumuskan hubungan Islam (Syariah) dan demokrasi. Meskipun Amien menolak Syariah dijadikan sebagai konstitusi negara, tetapi lebih menerimanya sebagai patokan moral-etik kehidupan bernegara, Amien Rais membela demokrasi untuk melindungi Syariah dari penyelewengan.

Ada dua kemungkinan dengan perubahan sikap Amien Rais belakangan ini yang secara faktual lebih inklusif dan akomodatif terhadap berbagai kekuatan bangsa yang pluralistik. *Petama*, dengan membela demokrasi untuk melindungi Syariah Islam, maka apresiasi dan pembelaan Amien Rais terhadap demokrasi itu merupakan “strategi perjuangan” untuk membela kepentingan Islam secara eksklusif, salah satunya adalah representasi politik umat Islam. Sikap politik Amien Rais akhir-akhir ini yang cenderung inklusif PAN yang dipimpinnya

juga merekrut berbagai tokoh nasional dari berbagai agama dan etnis sesungguhnya merupakan keinginannya agar mekanisme demokrasi yang sehat bisa berjalan dengan baik, dimana dalam demokrasi yang menentukan adalah suara mayoritas, yaitu suara Islam.

Berbicara tentang negara Islam, Amien Rais menjelaskan memang tidak setuju kalau didirikan sebuah negara Islam di Indonesia atau al-Qur'an dan Hadist dijadikan sebagai konstitusi negara atau hukum positif seperti dipraktekkan oleh beberapa negara Islam di Timur Tengah. Namun, ia sangat menentang adanya upaya atau keinginan untuk mendistorsi Syariah Islam dari wacana dan praktek kehidupan aktual masyarakat Indonesia yang secara *de facto* mayoritas beragama Islam. Dalam konteks inilah Amien Rais sangat apresiatif dan pro demokrasi, karena jika tradisi dan mekanisme demokrasi berjalan sehat, maka upaya untuk mendistorsi atau menyelewengkan Syariah akan berhadapan dengan kekuatan demokrasi yang sangat besar itu. Logikanya, jika mekanisme demokrasi berjalan dengan baik, maka mayoritas jabatan politik atau posisi-posisi strategis dalam institusi negara akan dipegang oleh tokoh Islam yang merepresentasikan mayoritas warga negara. Dalam konstelasi politik demikian, sangat kecil kemungkinan akan terjadi penyelewengan dan distorsi terhadap Syariah Islam, dan kepentingan mayoritas umat Islam secara umum.

Pluralisme yang hendak dipertahankan, dalam konteks di atas, adalah pluralisme masyarakat yang didalamnya berlaku hukum-hukum atau mekanisme demokrasi secara prosedural. Dan dalam prosedur demokrasi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (*voting*). *Kedua*, perubahan sikap itu muncul sebagai kesadaran kritis Amien Rais bahwa demokrasi harus dibangun dengan mempertahankan pluralisme yang ada. Tanpa ada apresiasi terhadap pluralisme, demokrasi yang ada hanya akan bersifat semu.

Pemikiran politik Amien Rais telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi diskursus intelektual Sunni Indonesia secara umum, khususnya bagi berakhir dan tuntasnya hubungan Islam dan negara (demokrasi) yang selama dekade sebelumnya diwarnai penuh ketegangan dan sikap saling curiga. Pemikiran demokrasi Amien juga banyak mendorong tumbuhnya gairah baru

dikalangan intelektual Indonesia utamanya dari kalangan muda, baik di Muhammadiyah maupun NU, untuk lebih serius memperjuangkan demokrasi. Dan kini kesadaran akan pentingnya demokrasi bagi perwujudan masyarakat yang adil dan egaliter serta menjamin kemaslahatan rakyat yang sudah semakin tinggi.

Besarnya kontribusi dan pengaruh pemikiran Amien Rais dalam diskursus demokrasi Indonesia mempunyai keterkaitan langsung dengan jabatannya sebagai ketua umum sebuah organisasi Islam terbesar. Sebelum menduduki posisi puncak organisasi, yaitu menjadi ketua umum PP Muhammadiyah dan ketua umum DPP PAN, Amien Rais sudah memiliki pemikiran yang kritis dan progresif. Namun, kontribusi dan pengaruh pemikiran Amien terhadap debat-debat publik secara implikatif kurang bermakna strategis-signifikan jika Amien tidak menduduki jabatan elit organisasi Islam terbesar.

Namun, meski gagasan-gagasan Amien Rais bisa dikategorisasikan sebagai representasi sikap dan pemikiran kaum Sunni kontemporer, dalam aktualisasi kehidupan praksisnya, Amien jarang mengaku atau mengklaim sebagai representasi dari intelektual Sunni. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, karena Sunni di Indonesia merupakan “mayoritas tunggal” yang menguasai dan mendominasi diskursus keIslaman secara umum, sehingga penegasan identitas kesunian secara vulgar dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu.

Pikiran-pikiran dan gagaan-gagasan Amien dalam soal kenegaraan pada hakekatnya hanyalah merupakan hasil evaluasi terhadap sistem sosial dan politik, baik pada masa-masa awal Islam, masa kemerdekaan, masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Karena itu, teori-teori yang diajukan lebih merupakan hasil refleksi atas realitas politik pada suatu masa daripada merupakan teori yang dianut dan dipraktekkan pada masa sesudahnya. Akan tetapi, bagaimanapun juga Amien dengan segala kekuatan dan kelemahannya telah ikut memberikan suatu pemikiran mengenai konsep negara Islam, dan dengan pemikirannya itu telah memperkaya muansa pemikiran politik Islam.

